

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi telah merubah pelaksanaan perpolitikan indonesia yang selama 32 tahun bersifat otoriter dan anti terhadap kritik, demokrasi sebagai satu ideologi tentang adanya persamaan hak dalam satu negara masuk menjadi penyegar. Globalisasi telah menandai akan terjadinya segala perubahan tersebut, berbagai lembaga mulai menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, tidak terkecuali birokrasi sebagai tonggak pelayanan utama masyarakat terlepas dari adanya perubahan tersebut.

Menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi merupakan suatu keputusan yang harus diambil dengan mengambil langkah-langkah antisifatif, mulai dari penguasaan tekhnologi, menciptakan strategi pelayanan yang cepat dan bermutu hingga merampingkan organisasi dengan anggapan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Namun apakah dengan begitu mudah birokrasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya?jawabannya tidak secepat perubahan itu terjadi.

Birokrasi berbeda dengan sektor swasta yang dengan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, birokrasi adalah sebuah lembaga besar dengan berbagai macam kompleksifitas yang terjadi didalamnya, segala perubahan yang terjadi didalam birokrasi harus melalui proses politik dengan segala macam karakteristik stakeholder yang memiliki kepentingan

Undang, Perpres, Peraturan Pemerintah hingga Peraturan-peraturan lainnya yang harus dilalui melalui proses politik yang menyebabkan birokrasi menjadi lamban dalam menyesuaikan diri dengan perubahan.

Dalam hal kinerja, birokrasi tidak memiliki tolok ukur yang jelas dalam menilai baik dan tidaknya kinerja yang telah dilakukan oleh aparatnya, anggaran tidak dijadikan tolok ukur bagi pemerintah untuk menilai kinerja birokrasi dan penilaian kinerja tidak berdasarkan output dan capaian hasil yang terkait dengan misi utama, tetapi sebaliknya lebih didasarkan atas input dan volume kegiatan yang menyebabkan terciptanya inefisiensi dan tidak adanya motivasi untuk merubah budaya kerja yang ada.

Birokrasi bagaikan sebuah kerajaan yang dijadikan arena untuk membangun kerajaan pejabat, sebuah kerajaan yang memiliki pengaburan visi untuk membangun peradaban masyarakat dan hanya sebuah kerajaan yang dijadikan untuk melegitimasi kepentingan-kepentungan para penguasanya. Adanya motivasi yang tinggi berupa keinginan untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan yang sudah dimilikinya dalam birokrasi mengalahkan tujuan awal yang ingin diraih dari birokrasi yakni menjadikan dirinya pelayan dan pembawa perubahan dalam masyarakat.

Terbukanya akses berbagai kelompok masyarakat dewasa ini dalam hal pendidikan dan telah dimulainya era yang bernama demokratisasi menjadi pendorong bagi birokrasi untuk merubah kultur yang ada, tingginya kualitas pendidikan dan demokratisasi dalam masyarakat memberikannya

melalui lembaga legislatif dan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh berbagai lembaga dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal pelayanan, birokrasi berbeda dengan sektor swasta yang sangat menghormati pelanggan, pelayanan yang cepat dan ramah telah menjadi karakteristik sektor swasta, mereka sadar bahwa hidup matinya perusahaan sangat ditentukan oleh kepuasan pelanggannya sedangkan birokrasi tidak seperti itu, rendahnya penghormatan terhadap konsumen, tidak menentunya pelayanan hingga menjamin praktek KKN rasanya sudah menjadi hal yang biasa dalam makhluk yang bernama birokrasi.

Birokrasi adalah organisasi terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia, hal tersebut tentunya tidak dapat dipungkiri mengingat manusia sebagai makhluk sosial mulai dari lahir hingga kematian tidak terlepas dari birokrasi. Sebagai organisasi besar, tentunya didalamnya terdapat berbagai macam satuan kerja atau dinas yang memang dibentuk berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi ataupun sebagai pengawas dari pelaksanaan suatu keputusan pemerintah.

Polisi Pamong Praja salah satunya, demi tegaknya peraturan-peraturan daerah keberadaannya sangat diperlukan sebagai satu perangkat yang melakukan pengawasan dan ketertiban. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan terciptanya ketentraman dan ketertiban serta menegakkan peraturan yang dikeluarkan. Dalam rangka melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan untuk mengatasi hambatan-

pelaksanaan tugas sehari-hari. Untuk memaksimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan sumberdaya yang dimiliki agar tidak adanya penghamburan sumberdaya yang dapat memboroskan tenaga dan biaya.

Karena pentingnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban serta menegakkan peraturan daerah itulah penulis berminat mengadakan penelitian mengenai “Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tegal”.

B. Perumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah yang telah diuraikan di muka, maka penulis berusaha merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut “Bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tegal pada tahun 2006” ?

C. Kerangka Dasar Teori

Menurut Muchtar Mas’ud yang dimaksud dengan teori adalah;

“Teori adalah bentuk penjelasan umum yang menjelaskan mengapa suatu (fenomena) itu terjadi. Teori merupakan serangkaian konsep-konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis berhubungan atau menentukan suatu hipotesa.”¹

Teori juga merupakan ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara berbagai gejala atau perubahan variabel dalam bidang tertentu sehingga dapat dipergunakan sebagai kerangka berfikir dalam memahami dan menangani permasalahan yang timbul dalam bidang tertentu.²

Pada dasarnya teori merupakan generalisasi yang abstrak mengenai

¹ Muchtar Mas,ud, *Disiplin dan Metode*, LP3ES, Jakarta, Hal 216

² Buntoro Tjokroamindjojo, H. Prof. Dan Mustoko Diningrat, Drs, *Teori Strategi Pembangunan*

beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori memakai konsep, sedangkan konsep lahir dari pikiran (*mind*) dan bersifat abstrak. Walaupun dalam penelitian fakta-fakta dapat digunakan sebagai batu loncatan dalam melakukan penelitian.

Kita dapat menarik kesimpulan dari pernyataan diatas, bahwa teori merupakan prinsip-prinsip umum yang bersumber pada fakta-fakta yang digunakan sebagai batu loncatan dan juga dapat memberi arah bagi proses penelitian ilmiah.

Sehubungan dengan judul penelitian diatas, di dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan dan menjelaskan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban serta menegakkan peraturan daerah Kabupaten Tegal.

Sebelum penulis melangkah lebih jauh, ada baiknya penulis memberikan gambaran mengenai kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal tugas, wewenang, dan peranannya dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal.

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan yang terjalin antara variabel dengan berdasarkan pada konsep definisi tertentu. Pada bagian kerangka dasar teori

1. Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat pula diartikan sebagai hasil, kerja yang mampu dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang tergabung dalam suatu instansi atau organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau instansi secara legal dan sesuai dengan moral dan etika³.

Kinerja yang sering juga disebut dengan “performance” merupakan tingkat keberhasilan organisasi atau suatu instansi dalam melaksanakan pekerjaan.⁴

1) Kinerja Organisasi

Dalam suatu organisasi atau instansi yang memiliki banyak anggota, kinerja setiap anggota dapat mempengaruhi kinerja organisasi atau instansi secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mencapai kinerja para anggota yang terlibat dalam organisasi atau instansi perlu ditingkatkan. Menurut Miner, kinerja seseorang atau instansi dapat diukur dengan melalui kualitas pekerjaan mencakup pemahaman dan penguasaan tugas, kebutuhan instansi-instansi dalam pelaksanaan tugas kemampuan dalam memecahkan masalah.⁵

Ketelitian dalam tugas, efisiensi waktu, tenaga, dan biaya dalam melaksanakan tugas, ketekunan dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas, timbulnya inisiatif, sikap terhadap tugas, kemampuan dalam bekerja sendiri

³ Agus Dwiyanto, *Penelitian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Fisipol UGM, 1995, hal 8.

⁴ John B. Miner, *Organization Behaviour, Performance Productivity*, New York, Random House, 1998, hal 57

⁵ Ibid.

atau tim, memiliki tanggung jawab, kecakapan anggota instansi dalam menggunakan peralatan kerja. Sementara pada ukuran kinerja yang kuantitas pekerjaan mencakup menyelesaikan seluruh pekerjaan yang terdapat dalam instansi.

2) Aspek-aspek Kinerja Organisasi

Dalam menentukan ukuran kinerja organisasi publik tidak semudah dalam mengukur kinerja organisasi swasta atau privat. Kinerja dapat diukur melalui kemampuan produksi, keuntungan yang diraih, efisiensi biaya, dan efektifitas serta kemampuan dalam berkompetisi. Namun pada organisasi publik pengukuran kinerja sulit dilakukan karena tujuan dan misi dari organisasi publik seringkali bersifat multidimensional.⁶ Kendati demikian keberhasilan kinerja organisasi publik dapat diketahui dari kemampuan organisasi publik dalam mencari atau mewujudkan tujuannya.

Dengan berkembangnya paradigma dan organisasi sektor publik, maka kinerja organisasinya telah dimasukkan dalam domain kinerja sektor privat. Oleh karena itu, Perry⁷ mengungkapkan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja adalah *work load demand, economic, efficiency, effectivitieness*, dan *equity*. Berbeda dengan Perry, Lavine⁸ menyatakan bahwa untuk mengukur kinerja organisasi publik, maka aspek yang digunakan adalah sebagai berikut

1) Responsivitas (*Responsiveness*)

Aspek responsifitas mengacu kepada keselarasan program dan kegiatan

⁶ Agus Dwiyanto, *Op.Cit* hal 16

⁷ *Ibid*, hal 18

⁸ *Ibid*, hal 21

pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan dan keinginan masyarakat. Kinerja organisasi publik semakin baik dinilai semakin baik apabila dibutuhkan dan keinginan masyarakat banyak diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik.

2) *Responsibilitas (Responsibility)*

Aspek *responsibilitas* mencakup kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip baik secara implisit maupun eksplisit. Dalam aspek ini, kinerja organisasi publik dinilai semakin baik apabila kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi, peraturan dan kebijakan organisasi.

3) *Profesionalisme*

Aspek *profesionalisme* menunjukkan sifat dari suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis. *Profesionalisme* menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para pengelola organisasi karena semakin tumbuhnya kompleksitas masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dan semakin canggih perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4) *Akuntabilitas (Accountability)*

Aspek ini diartikan sebagai peranggung jawaban dari para aparatnya tentang apa yang telah dilakukan terhadap pihak yang berkepentingan. Konsep ini mengarah kepada pengertian bahwa segala tindakan organisasi akan dinilai dan dievaluasi oleh kalangan yang terkait atau memiliki kepentingan. Salah satu cara untuk mengukur *akuntabilitas* tersebut adalah melaksanakan rapat

dilakukan oleh organisasi, karena hal tersebut akan menjadi bahan koreksi bagi organisasi dalam melakukan pembenahan-pembenahan dalam meningkatkan kualitas.⁹

Bagi setiap organisasi, penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Kegunaan penilaian kinerja adalah ;

- 1) Menilai kualitas, kuantitas dan efisiensi pelayanan
- 2) Memotivasi birokrat pelaksana
- 3) Memonitor para kontraktor
- 4) Melakukan penyesuaian anggaran
- 5) Mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani
- 6) Menuntun perbaikan dalam pelayan publik

Penyebab kesulitan dalam pengukuran kinerja adalah ;

- 1) Tujuan dan misi organisasi pelayanan publik sangat kabur bersifat multidimensional
- 2) *Stakeholders* (pengambil kebijakan) jauh lebih banyak dan kompleks daripada orang swasta
- 3) *Stakeholders* sering kali memiliki kepentingan yang berbenturan antara satu dengan yang lainnya

⁹ Pribadi Ulung, *Perubahan Paradigma organisasi, Perencanaan Strategis, Manajemen Total Kualitas dalam Pengembangan Organisasi*, (Diktat Mata Kuliah Pengembangan Organisasi

permasalahan penilaian kinerja pemerintah daerah adalah :

Aparat pemda hanya mengetahui :

- 1) Peraturan perundangan didirikan pemda
- 2) Target pembangunan yang siap untuk dilaksanakan
- 3) Metode operasi, petunjuk pelaksanaan dan teknis
- 4) Garis koordinasi tertentu

Mereka tidak memahami :

- 1) Apakah pemda sebagai organisasi publik di daerah telah berhasil mencapai tujuan
- 2) Apakah kinerja pemda cukup berhasil¹⁰

5). *Produktivitas*

Konsep produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. produktifitas umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktifitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktifitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

2. **Pemerintah daerah**

a. **Pengertian Pemerintah Daerah**

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat daerah-daerah otonom dan pemerintahan di daerah-daerah itu disebut "Pemerintahan

¹⁰ Zaenuri Muhammad, *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan*, (Diktat Mata Kuliah Jurusan IP Fakultas ISIPOL, UMY)

Daerah". Sebagaimana telah sama-sama diketahui, praktis semua anggaran.

Negara mengenal apa yang disebut pemerintah nasional adalah pemerintah yang meliputi seluruh wilayah dan seluruh penduduk negara dan pemerintahan setempat hanya mengenal sebagian penduduk saja dan wilayah negara.¹¹

Pemerintah daerah menurut Mariun adalah ;

“suatu bentuk daripada pemerintahan setempat dalam nama kepada masyarakat setempat diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri”¹²

Menurut Undang-undang no 22 tahun 1999 pasal 5 ayat 1 daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Menurut pasal 1 huruf i Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang dimaksud daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan azas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-undang no 22 tahun 1999 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kretivitas,

kota, sehingga gubernur bukanlah merupakan atasan dari bupati atau walikota. Akan tetapi, dalam prakteknya tetap ada hubungan koordinasi, kerja sama dan kemitraan daerah propinsi dengan daerah kabupaten atau daerah kota dalam kedudukan masing-masing daerah otonom. Disamping itu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat melakukan hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten dan daerah kota.

Pemberian kedudukan propinsi sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan ialah

¹³;

- 1) Untuk memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas daerah kabupaten dan daerah kota serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan baik daerah kabupaten maupun daerah kota.
- 3) Untuk melaksanakan tugas –tugas pemerintah tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi.

b. Pembagian Daerah menurut Undang-Undang No 22 tahun 1999

Dalam hal pembagian daerah menurut Undang-Undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menjadi pertimbangan adalah ;

- 1) Faktor Kemampuan ekonomi
- 2) Faktor potensi daerah

¹³ Dedi Supriyadi, Brata Kusuma, Phd. Dadang Solihin, MA, *Otonomi Penyelenggaraan*

- 3) Faktor sosial daerah
- 4) Faktor sosial politik
- 5) Faktor jumlah penduduk dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah propinsi, sedang daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah kabupaten dan kota. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

1) Daerah propinsi

Daerah propinsi sebagai daerah otonom juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau arah perairan kepulauan. Daerah propinsi yang dahulu disebut daerah tingkat I sekarang disebut propinsi

2) Daerah kabupaten dan daerah kota

daerah kabupaten dan daerah kota bersifat otonom yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sebutan daerah tingkat II dan kotamadya daerah tingkat II yang berlaku selama ini diganti dengan sebutan kabupaten atau kota.

3) Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Kecamatan yang menurut Undang-undang no 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, sebagai wilayah administrasi dalam angka dekonsentrasi. Menurut Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, kedudukannya diubah menjadi perangkat kabupaten atau daerah kota.

4) Kelurahan atau Desa

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut sebagai lurah. Lurah diangkat dari PNS yang memenuhi syarat walikota atau bupati atas usul camat. Pembentukan kelurahan ditetapkan dengan peraturan daerah. Desa dibentuk pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan pemerintah desa, yang terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat desa. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk dari desa calon yang memenuhi syarat dan masa jabatan kepala desa paling lama 10 tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Kepala desa dilantik oleh bupati.

3. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan ketentuan pasal 120 Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), perlu mengatur susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas, dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja.

Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mengubah sistem pemerintahan dari yang semula senntralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut berkaitan kepada status Polisi Pamong Praja, di mana status Polisi Pamong Praja sebelumnya merupakan perangkat wilayah sekarang menjdai Perangkat Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan polisi Pamong Praja sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan status Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemeintahan daerah. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 pasal 1 Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan

Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah

Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya (khususnya di bidang penegakan peraturan daerah/keputusan kepala daerah) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja selalu berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang berdasarkan Undang-undang ditunjuk selaku penyidik atas tindakan pidana dalam lingkup Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukunya serta telah memperoleh pengangkatan dari menteri Kehakiman Republik Indonesia (Satuan polisi pamong Praja Jawa tengah, 2002)

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa PPNS adalah pejabat PNS tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

D. Definisi Konsepsional

Definisi konseptual merupakan suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lain agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penulisan. Adapun definisi konseptual yang digunakan adalah ;

1. Kinerja

Kinerja merupakan suatu hasil karya yang dapat dicapai oleh individu atau sekelompok individu dalam suatu organisasi yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode waktu tertentu dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Pemerintah daerah

Organisasi pemerintah daerah merupakan bagian dari elemen-elemen atau unsur negara yang berada dibawah pemerintah pusat dan mengelola serta memberdayakan sumber daya dalam wilayah yang dilingkupinya.

3. Satuan Polisi Pamong Praja

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang menunjukkan cara mengukur suatu variabel, di samping itu, definisi operasional juga dapat diartikan sebagai petunjuk dan pelaksana untuk mengukur suatu variabel. Terkait dengan pengertian definisi operasional tersebut, maka indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur

variabel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Aspek responsibilitas

Diukur dengan indikator :

- a. Adanya rencana strategis yang telah tersusun dan tertulis
- b. Adanya kebijakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya visi.

2. Aspek profesionalisme

Diukur dengan indikator

- a. Tingkat pendidikan pegawai
- b. Kesesuaian bidang keahlian dan pekerjaan pegawai
- c. Tingkat penyelesaian kerja yang dilakukan oleh pegawai yang efisien
- d. Kemampuan Pemda kabupaten Tegal dalam menerima aspirasi dan kebutuhan masyarakat
- e. Pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja pemerintah kabupaten

3. Aspek Akuntabilitas

Diukur dengan indikator :

- a. Laporan koordinasi pelaksanaan program pembangunan di wilayah kabupaten
- b. Pemantauan pelaksanaan pembanguna wilayah kabupaten
- c. Adanya evaluasi kegiatan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten dalam bentuk laporan

4. Aspek Produktivitas

Diukur dengan indikator ;

- a. tercapai atau tidaknya program kinerja yang telah ditentukan.

5. Aspek Responsivitas

Diukur dengan indikator :

- a. bagaimana kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya.
- b. bagaimana keselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban serta dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja tersebut
- c. Untuk mencari hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban

4. Bagaimana peraturan daerah Kabupaten Tegal kemudian solusi

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi mahasiswa penelitian ini merupakan penerapan teori dalam praktek pembuatan karya ilmiah.
- b. Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi kebijakan berkaitan dengan tugas-tugas satuan polisi pamong praja.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang satuan polisi pamong praja.
- d. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata Yunani yaitu *Methodos* yang mempunyai makna alat untuk memahami suatu obyek yang akan diteliti. Berkaitan dengan upaya ilmiah metodologi menyangkut cara kerja guna memahami obyek yang akan menjadi sasaran sesuai dengan ilmu yang bersangkutan.

Penelitian merupakan suatu proses dan suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.

Langkah-langkah yang dilakukan tersebut harus serasi dan saling mendukung satu sama lain. Hal ini berguna dalam mengambil kesimpulan agar penelitian tersebut berbobot dan tidak dirugikan lagi keabsahannya.

Menurut Koentjaraningrat, metode penelitian adalah suatu syarat kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan¹⁴.

Dalam metodologi penelitian terdapat: tipe penelitian, teknik pengumpulan data, Unit analisis dan sumber data, teknik analisis data, Lokasi penelitian.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian (Koentjaraningrat; 1984 : 46) ¹⁵ada 3 yaitu:

- a. Penelitian yang bersifat menjelajah bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala itu, dengan maksud untuk merumuskan masalah secara lebih terperinci atau mengembangkan hipotesis.
- b. Penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu keadaan gejala/kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara gejala yang lainnya dalam masyarakat.
- c. Penelitian yang bersifat menerangkan, bertujuan menguji hipotesis-hipotesis tentang adanya variabel yang akan diteliti.

Berdasarkan beberapa pengertian tipe penelitian tersebut, penulis dalam melakukan penelitian menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif maksudnya bertujuan untuk menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong

¹⁴ Koentjaraningrat, Metodologi Penelitian Masyarakat, PT Gramedia, Jakarta 1984, Hal. 16

Praja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal, dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya serta cara-cara mengatasi hambatan tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah:

- a. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap obyek yang diselidiki, yaitu pengamatan tentang strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal.
- b. Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara menggunakan kuesioner terbuka yang ditujukan kepada responden yaitu para personil Satuan Polisi Pamong praja.
- c. Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku ilmiah, majalah, brosur-brosur, hasil akhir laporan, kliping yang berhubungan dengan pokok bahasan dan permasalahan dokumen maupun media massa termasuk internet guna menganalisis data baik kuantitatif maupun kualitatif

3. Unit Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian , maka yang menjadi unit analisis data adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dan orang- orang yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Dan sebagai data pendukung data dari

dari beberapa sumber antara lain dari media baik massa maupun elektronik.

Untuk mempermudah menganalisis data, maka standarisasi data ditentukan melalui hal-hal sebagai berikut :

a. Penentuan kualitas jawaban

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan penulis menggunakan standar nilai dari masing-masing jawaban sebagai berikut :

- 1) Untuk jawaban (a) bobotnya = 4
- 2) Untuk jawaban (b) bobotnya = 3
- 3) Untuk jawaban (c) bobotnya = 2
- 4) Untuk jawaban (d) bobotnya = 1

b. Penentuan skor

Skor dari jawaban tersebut ditentukan dengan menggunakan skala indeks dengan rumus sebagai berikut ;

$$I = \frac{1xf_1 + 2xf_2 + 3xf_3 + 4xf_4}{N}$$

Keterangan : I = Indeks dari sample/sub sample

f = Frekuensi sample/sub sample/contingency x

c. Penentuan kategori hasil skor

Penentuan kategori hasil skor ditentukan dengan skala interval, yang dinyatakan dengan rumus :

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan : I = besar interval kelas

R = jarak nilai tertinggi-nilai terendah

K = jumlah kelas

Interval kelas dengan rumus ini dapat dihitung sebagai berikut :

$$I = \frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

Jadi besarnya interval adalah 0,75 sehingga kategori hasil skor yang diperoleh adalah :

1. skor 1,00 – 1,75 termasuk kategori Tidak Baik
2. skor 1,76 – 2,50 termasuk kategori Kurang Baik
3. skor 2,51 – 3,25 termasuk kategori Cukup Baik
4. skor 3,26 – 4,00 termasuk kategori Baik

dari semua jawaban, setelah diolah akan diperoleh dari setiap jawaban dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan : P = persentase jawaban

F = frekuensi jawaban

n = jumlah responden

4. Tehnik Analisis Data

Prof. Dr. Noeng Muhadjir dalam bukunya menyatakan bahwa analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁶

Analisis data kualitatif yaitu data yang di kumpulkan merupakan studi kasus dan bersifat monografis, mudah diklasifikasi, dan jumlahnya sedikit. Penelitian kualitatif lebih menekankan hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penekanan bukan pada hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentasi.

¹⁶ N. Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Paksi Semarang, Yogyakarta, 1989, hal 171

Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dengan cara membaca catatan laporan, dokumentasi resmi dan sebagainya, untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini dengan memperhatikan validitasi, reabilitas dan objektivitas.

5. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah.